



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN

**PENGEMBANGAN PENGELOLAHAN
INFORMASI PKP DAN OPERASIONAL PPID**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Adapun laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Bab 1 adalah Pendahuluan, Bab 2 Referensi Hukum, Bab 3 membahas Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Bab 5 membahas Kesimpulan Dan Saran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2019 ini .

Medan, Januari 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3 Sasaran.....	1
1.4 Keluaran.....	2
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.6 Tenaga Pendukung.....	2
1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	2
Bab 2 Referensi Hukum	3
Bab 3 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik...	4
3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik.....	8
3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya.....	9
3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019.....	9
3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019.....	13
Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	14
Bab 5 Kesimpulan Dan Saran.....	15

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. Tanpa informasi, suatu perusahaan atau instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi agar dapat mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan – badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Pada konteks inilah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan beserta hasil dan manfaatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang akurat terkait dengan semua aktifitas dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Keluaran

Pada kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan adalah disajikannya informasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk berita dan di tampilkan ke dalam web site yang telah tersedia sehingga bisa di akses oleh masyarakat dengan seluas-luasnya.

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain :

- Melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data.
- mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi.
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

1.6 Tenaga Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh tenaga pendukung. Tenaga pendukung yang dimaksud bertugas menginput seluruh bahan serta data terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan menyusun laporan bulanan yang berisikan tentang penugasan yang telah dilaksanakan. Tenaga pendukung disyaratkan memiliki kualifikasi teknis sebagai berikut :

- Pria/wanita maksimal berusia 35 tahun;
- Pendidikan Sarjana S-1 Teknologi Informatika/Teknologi Informasi/Sistem Informasi;
- Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
- Mampu merekam, mengedit dan menyusun informasi sebagai bahan berita atas pelaksanaan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
- Menguasai *manage servis server* berikut software pendukungnya;

Adapun jangka waktu pekerjaan tenaga pendukung yang dimaksud selama 10 (sepuluh) bulan.

1.7 Jangka Waktu Pekerjaan

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan.

Bab 2

Referensi Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bab 3

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dalam rangka operasionalisasi PPID pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media, namun sebagai berikut :

- Melalui website <http://dispkp.sumutprov.go.id>

Website Dan Aplikasi PPID



Daftar Informasi Publik Di Aplikasi PPID

disipk.sumsu/prov.go.id/updated/daftar-informasi-publik/

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**
"Sampah Bersih, Tempat Bersih, Warga Sehat, Lingkungan Bersih"

HOME PROFIL BIDANG PPID BERITA & KEGIATAN REGULASI DOWNLOAD GALERI HUBUNGI KAMI

VISI & MISI
PROFIL PPID
STANDAR PELAYANAN PPID
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI
KONTAK
LAPORAN PPID

Show 10 entries

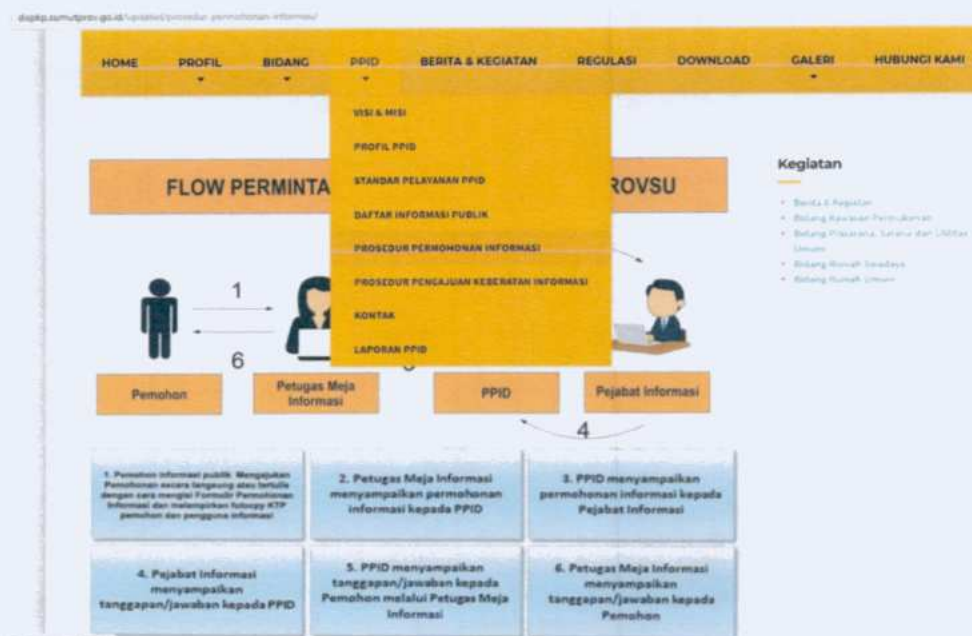
No	Jenis Informasi
1	Daftar Nama Pejabat
2	Peraturan Gubernur
3	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
4	Rencana Kerja JA 2018
5	RENCANA STRATEGIS

Showing 1 to 5 of 1 entries

Kegiatan

- Berita & Kegiatan
- Bidang Kawasan Permukiman
- Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- Bidang Rumah Swadaya
- Bidang Rumah Umum

Prosedur Permohonan Informasi



Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

disipki.sumsutprov.go.id/kegiatan/prosedur-pengajuan-keberatan-informasi/



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Sejahtera, Sehat, Tegas, Berkeadilan, Dapat Dipertanggungjawabkan

[HOME](#)
[PROFIL](#)
[BIDANG](#)
[PPID](#)
[BERITA & KEGIATAN](#)
[REGULASI](#)
[DOWNLOAD](#)
[GALERI](#)
[HUBUNGI KAMI](#)

PROSEDUR PENGAJUAN

- Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika di antara:
 - Tidak diadikannya informasi berkala
 - Penolakan atas permohonan informasi
 - Tidak ditanggapinya permohonan informasi
 - Permohonan informasi publik ditanggapi
 - Tidak dipenuhinya permohonan informasi
 - Pengerasan biaya yang tidak wajar
 - Penyampaian informasi publik yang melambatkan
- Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis ke

TATA CARA PENGAJUAN

- Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
- Atasan PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara harus memberi tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID mengurungkan putusan yang ditetapkan sebelumnya maka alasan tertulis disertai bersama tanggapan tersebut
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sanggata keberatan selesai
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sanggata informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN INFOMASI

Kegiatan

- Berita & Kegiatan
- Belang Kawasan Permukiman
- Belang Perumahan, Sarana dan Utilitas Umum
- Belang Rumah Swadaya
- Belang Rumah Umum

Laporan PPID

disipki.sumsutprov.go.id/kegiatan/laporan-ppid/



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Sejahtera, Sehat, Tegas, Berkeadilan, Dapat Dipertanggungjawabkan

[HOME](#)
[PROFIL](#)
[BIDANG](#)
[PPID](#)
[BERITA & KEGIATAN](#)
[REGULASI](#)
[DOWNLOAD](#)
[GALERI](#)
[HUBUNGI KAMI](#)

Laporan Layanan Informasi Publik

- Laporan Layanan Informasi Publik Ta. 2017
- Laporan Layanan Informasi Publik Ta. 2018

Showing 1 to 2 of 2 entries

PPID

PROFIL PPID

STANDAR PELAYANAN PPID

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

KONTAK

LAPORAN PPID

Kegiatan

- Berita & Kegiatan
- Belang Kawasan Permukiman
- Belang Perumahan, Sarana dan Utilitas Umum
- Belang Rumah Swadaya
- Belang Rumah Umum

disipki.sumsutprov.go.id

Sumatera Utara - Indonesia

Atom Optimized
Senin - Jumat 08.00 - 16.00

Tempat Terima Tamu



3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Secara operasional PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : 061.1/2259/PKP-Provsu/2019 yaitu :

1. Kepala Dinas selaku Atasan PPID
2. Kasubbag Umum selaku PPID Pembantu
3. Kasubbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik selaku Sekretaris PPID Pembantu.
4. Syafri Chaniago, ST (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik) selaku Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi.
5. Fitria Dewi, ST (Staf Bidang PSU) selaku Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi.
6. Agus Tiawan Setiadi (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik) selaku Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
7. Petugas Informasi dan Pembuat Berita masing-masing seksi :
 - Hotdo, S.Sos
 - Armada Sahputra, ST
 - Nahran
 - Anthoni Veery Mardianta, ST, MT
 - Azwin Anwarsyah Pasaribu, ST

3.3 Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya

Tahun Anggaran 2019, melalui APBD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan nama kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dengan pagu anggaran sebesar Rp160.269.950,00 (Seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 125.400.000,00 selama Satu Tahun;
- Belanja Cetak sebesar Rp. 2.369.950,00
- Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka rapat sebesar Rp. 2.500.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Pendukung (Tenaga Ahli IT) sebesar Rp. 30.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 10 (sepuluh) Bulan.

3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019

No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Tujuan Penggunaan Informasi	Informasi Yang Diminta	Keputusan	Tanggal Jawaban
1.	26 Feb 2019	Aulia Rahman Purba	Engine sales	Kebutuhan Genset Dinas PKP	Penganggaran pembelian genset	Genset dibutuhkan apabila telah dilakukan pemb. Gedung kantor Dinas PKP yang baru	-
2.	20 Maret 2019	Yaulina Mendrofa, ST	Dinas Perkim Kab.Nias Selatan	Usulan Kebutuhan Rumah Khusus	Mekanisme pengajuan proposal rumah khusus	-	-
3.	27 Maret 2019	Faduhusa Laia	DPRD Kab.Nias Selatan	Untuk memastikan proposal bedah rumah di Kab.Nias Selatan	Mekanisme pengajuan proposal bedah rumah	Kegiatan RTLH bersumber dari Dana APBN dan APBD, untuk proposal melalui dana DAK perumahan bisa langsung disampaikan melalui aplikasi Krisna	-

4.	1 April 2019	M.Irfan Taguh	Dinas Perkim dan Perhubungan Kab.Palas	Koordinasi permohonan pemb. Rumah susun pondok pesantren Babul Hasanah	Mekanisme permohonan pemb. Rumah susun pondok pesantren Babul Hasanah	Pemb.rumah susun akan difasilitasi untuk dimohonkan ke Kementerian PUPR	-
5.	23 April 2019	Melati Sipayung	Dinas Perkim Dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
6.	23 April 2019	Ade Mirna Pris Rezeki, ST	Dinas Perkim Dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
7.	23 April 2019	Suharni Lubis, SH	Dinas Perkim Dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
8.	23 April 2019	M.Hafril Fadli	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
9.	23 April 2019	Achmad Ridwan, ST	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
10.	23 April 2019	Hendro Susanto	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
11.	23 April 2019	Fariz Hamzah	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-

12.	7 Mei 2019	Jhonson	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Penyampaian Produk Pabrik Septictank Individualy	-	-	-
13.	7 Mei 2019	Indra Kusuma	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Penyampaian Produk Pabrik Septictank Individualy	-	-	-
14.	17 Mei 2019	Kesadaran Zagoro, SE	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab.Nias Selatan	Usulan DAK Afirmasi, DAK Reguler, BSPS	Tata cara pengusulan DAK Afirmasi, DAK Reguler, BSPS	-	-
15.	29 Mei 2019	Ahmad Ibnu Khaldu, ST	Bappeda Tapteng	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
16.	29 Mei 2019	Hadi Saputra	Bappeda Tapteng	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
17.	27 Agustus 2019	Yoseph	Balitbang PUPR	Dalam rangka kegiatan penelitian wilayah pengembangan strategis	Data Primer kegiatan pada Dinas PKP Provsu	-	-
18.	9 September 2019	Zahara	Sales Government PT. Mitsubishi	Penawaran perawatan pengadaan kendaraan	-	-	-
19.	16 September 2019	Randoswati Pohan	Komisi Informasi Provsu	Visitasi untuk peningkatan keterbukaan informasi	Ketersediaan ruang PPID dan pendukung lainnya	-	-

20.	16 September 2019	Bestani	Kecamatan Hamparan Perak	Mengantarkan berkas Sei Bederah Kec. Hamparan Perak	-	-	-
21.	16 September 2019	Faisal	Kecamatan Hamparan Perak	Mengantarkan berkas Sei Bederah Kec. Hamparan Perak	-	-	-
22.	16 September 2019	Chairil Edwin	Kecamatan Hamparan Perak	Mengantarkan berkas Sei Bederah Kec. Hamparan Perak	-	-	-
23.	17 September 2019	Muhammad Yusuf	SMA Negeri 1 Lab.Deli	Untuk data sekolah	Penjelasan tentang RKB SMA Negeri 1 Lab.Deli	-	-
24.	17 September 2019	Agustina Ketaren	Karyawan Swasta	Untuk mengetahui Informasi bangunan dipinggir sungai	Peraturan Sempadan sungai untuk bangunan di Kota Medan	-	-
25.	7 Oktober 2019	Dian kusumawardhani	BPIW Kementerian PUPR	Untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai masukkan dalam penyusunan program pengembangan kawasan	Data program pembangunan infrastruktur bidang PUPR Tahun Anggaran 2015-2019 dengan sumber dana APBD	-	-
26.	15 Oktober 2019	Bintang M Purba	Konsultan	Permohonan Data	Untuk kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi dim kws Strategis Provsu	-	-

3.4 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019

Dalam rangka memberi informasi seluas-luasnya kepada publik, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menampilkan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk berita pada Website Dinas. Adapun untuk Tahun 2019, jumlah berita yang telah di tampilkan sebanyak 40 berita. Adapun berita tersebut terdiri dari kegiatan di lingkungan Kantor Dinas maupun kegiatan yang sifatnya di luar Kantor Dinas.

Bab 4

Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Secara keseluruhan kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID masih dirasa kurang maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil visitasi Komisioner Informasi ke Kantor Dinas PKP Provsu pada tanggal 16 September 2019, diperoleh beberapa tanggapan dan masukan terkait dengan pelaksanaan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas PKP Provsu antara lain :

- Agar setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang untuk dilaporkan ke Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik;
- Agar dibuat surat edaran untuk mengingatkan kepada anggota PPID agar melaksanakan tupoksi PPID sesuai dengan SOP;
- Agar memperbaiki sarana prasarana pendukung;
- Dalam hal pemberian data, perlu dibuat list data yang bertujuan untuk memilah data apa saja yang bisa dan atau yang tidak bisa diberikan;
- Terkait dengan daftar informasi yang dikecualikan, PPID Pembantu Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan PPID Provinsi dalam rangka pembuatan Surat keputusan Kepala Daerah tentang daftar informasi publik yang dikecualikan;
- Setiap ada permintaan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
 - Legalisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dari Kemenkumham,
 - Kartu Tanda Pengenal,
 - Alamat kantor harus sesuai dengan Akta Notaris.
- Masih kurangnya tenaga pendukung (Tenaga Ahli IT dan Ahli Komunikasi) untuk lebih meningkatkan kualitas website dan konten berita;



Visitasi Komisioner Informasi
Ke Kantor Dinas PKP Provsu

**Laporan Pengembangan Pengelolaan
Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID**

Lampiran

Bab 5

Kesimpulan Dan Saran

Adapun kesimpulan akhir dari kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID antara lain :

- Website sebagai wadah publikasi kegiatan Dinas PKP Provsu;
- Sarana prasarana merupakan instrumen penting dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan saran dapat di uraikan sebagai berikut :

- Perlunya pengembangan website;
- Perlu peningkatan sarana prasarana pendukung;
- Perlu adanya penambahan personil (Tenaga Ahli IT dan Ahli Komunikasi);

PPID Pembantu



Dra. Beslida Sahmawati, M.Si
Nip. 19671028 199203 2 004

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

*Daftar Permohonan Yang Masuk Ke PPID Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu
Tahun 2019*

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Yasmi P
NIK / NIP	:	116.31. 612129 063. 100
Alamat	:	Balibon Rute
Pekerjaan	:	
Umur	:	54
Jenis Kelamin	:	Laki
Nomor Telepon	:	0812 00600094
Asal Instansi	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Untuk Riset Riset Mulus
Informasi Yang Diminta	:	Siapa
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan,


(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : KESADARAN ZACROD, SE
NIK / NIP : NIP. 19790717 201410 1 003
Alamat : Desa Bawomataluo, kec. Pangyaman
Pekerjaan : PNS
Umur : 40 thn.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Telepon : 081396274447
Asal Instansi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kab. Nias Selatan
Tujuan Penggunaan Informasi :
Informasi Yang Diminta : Mengenai Usulan DAK Afirmasi, DAK REGULER, BspS

Pelayanan Informasi Oleh : Salmanianto, ST

Tanggapan Pemberi Informasi :

Penyusunan Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk pembiayaan DAK dan APBN (Program BspS) diusulkan melalui aplikasi terkait. Usulan DAK melalui aplikasi Krisna Selaras yang akan dilakukan parat berjenjang dari provinsi, kementerian PUPPT dan kementerian teknis. Daerah harus mengusulkan dengan melengkapi BUKA penerima manfaat dan selanjutnya penangan kawasan rumah.

Medan, 17 Mei 2019


(.....)

Nama	:	INDRA. KUSUMA
NIK / NIP	:	
Alamat	:	Jakarta
Pekerjaan	:	MANUSIA
Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Nomor Telepon	:	0813 6897 0877
Asal Instansi	:	PT. CAHAYA MAS CEMENLANG
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Informasi Yang Diminta	:	
Pelayanan Informasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Informasi	:	

(.....)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama : Jhansens
NIK / NIP :
Alamat : Jakarta
Pekerjaan : Market
Umur :
Jenis Kelamin :
Nomor Telepon : 082121368836
Asal Instansi : Pabrikasi Septictank individual /
Tujuan Penggunaan Informasi : Konsultasi
Informasi Yang Diminta : Konsultasi / presentasi produk

Pelayanan Informasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Informasi :

Medan,


(.....Jhansens.....)

Nama	: FARIZ HAMZAH
NIK / NIP	: 19830213 200504 1003
Alamat	: Jl. TIRTA DELI 86. MELUR. NO. 15 Tg. MOKAWA
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 36 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Nomor Telepon	: 08116306760
Asal Instansi	: BABPEDA TEBING TINGGI
Tujuan Penggunaan Informasi	: USULAN APBD PER 2020 TEBING TINGGI
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Informasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Informasi	:

(FARIZ HATAZAH

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Henbro Gusanto
NIK / NIP	:	197904 200502 1 001
Alamat	:	Jl. Astama kodim 0204/DS/LK 02 kel. Damar
Pekerjaan	:	Sari kec. P. Hilir. PNS
Umur	:	40
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Nomor Telepon	:	0853 7368 9424
Asal Instansi	:	Bappeda kota T-Tinggi
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Penyampaian usulan APBD prop
Informasi Yang Diminta	:	kota T-Tinggi
Pelayanan Infomasi Oleh	:	Kasubag
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	Baik

Medan, 23 April 2019



(Henbro Gusanto)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama	:	ACHRAD RIDWAN, ST
NIK / NIP	:	19710501 199903 1002
Alamat	:	JL. TAMAN BAHAGIA 28 A KOTA TEBINGTINGGI
Pekerjaan	:	PNS
Umur	:	48 TAHUN
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
Nomor Telepon	:	882274453033
Asal Instansi	:	BAPPEDA KOTA TEBINGTINGGI
Tujuan Penggunaan Informasi	:	PENYAMPAIAN USULAN APBD PROV 2020
Informasi Yang Diminta	:	-
Pelayanan Informasi Oleh	:	KASUBAG PROGRAM
Tanggapan Pemberi Informasi	:	BAIK

Medan, 23 - 04 - 2019


ACHRAD RIDWAN

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : SUHARWI LUBIS, SH
NIK / NIP : 10620902 199303 2002
Alamat : Jln. Gunung Agung
Pekerjaan : PNS
Umur : 56
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telepon :
Asal Instansi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Informasi Yang Diminta : Penyempurnaan usulan APBD Provisu

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan, 23-04-2019



(.....)

Nama	: ADE MIRNA PRIS ROZEKI, ST
NIK / NIP	: 19750917 200312 2 003
Alamat	: Jl. Nenas No.7 T. Tinggi
Pekerjaan	: PNS - ASN
Umur	: 44 Tahun
Jenis Kelamin	: Pr
Nomor Telepon	: 081262151463
Asal Instansi	: Dinas Perumahan Permukiman & Kebersihan
Tujuan Penggunaan Informasi	: Penyampaian usulan E - Musrenbang
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Ade M. P. Rezeki

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : MELATI SPATUNAS
NIK / NIP : 19870512 201001 2 023
Alamat : TELUK TINGGI
Pekerjaan : PNS
Umur : 31 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Nomor Telepon : 085260514445
Asal Instansi : DINAS PERUM & KEBERTAHAN KOTA T. TINGGI
Tujuan Penggunaan Informasi : PENYAMPAIAN URAIAN DATA APBD PROY
Informasi Yang Diminta :

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan, 23 APRIL 2017


(.....) MELATI SPATUNAS

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: M. IRFAN TAGUH
NIK / NIP	: 19830725 201001 1001
Alamat	: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS
Pekerjaan	: ASN
Umur	: 38 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Nomor Telepon	: 081269282726
Asal Instansi	: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS
Tujuan Penggunaan Informasi	: MENGANTAR PROPOSAL RUMAH SUSUN
Informasi Yang Diminta	: KOORDINASI PERMOHONAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN BABUL HASANAH
Pelayanan Infomasi Oleh	: Salmanah
Tanggapan Pemberi Infomasi	: pembangunan rumah susun untuk pondok pesantren akan di fasilitasi utk dimohonkan ke kementerian PPR.

Medan, 1 APRIL 2019



(M. IRFAN TAGUH)
19830725 201001 1001

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Yuliana Mendoza, ST
NIK / NIP	:	19820129 200502 1 00 1
Alamat	:	Teluk Arben
Pekerjaan	:	pns
Umur	:	37
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Nomor Telepon	:	082162705666
Asal Instansi	:	Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kab. Nias Selatan
Tujuan Penggunaan Informasi	:	koordinasi tentang urusan Rumah khusus
Informasi Yang Diminta	:	
Pelayanan Informasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Informasi	:	

Medan, 20/3 - 2019


Yuliana Mendoza, ST

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	M. Yusup Sitorang
NIK / NIP	:	19650105 1993 03 1003
Alamat	:	Jl. TUKI NO 1. KUSJARAN
Pekerjaan	:	PNS
Umur	:	53 th
Jenis Kelamin	:	laki - laki
Nomor Telepon	:	081263663265
Asal Instansi	:	Timus PKP Kab. Asahan
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Untuk Personalia Pustakawan di Asahan
Informasi Yang Diminta	:	tg usul kegiatan TA. 2020 ..
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan,


M. Yusup Sitorang.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : AULIA RAHMATI PURBA
NIK / NIP :
Alamat : PT. TRAKINDO UTAMA, TG. MORAW KM. 9,2 MEDAN
Pekerjaan : ENGINE SALES
Umur : 30 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Nomor Telepon : 08116157814
Asal Instansi : PT. TRAKINDO UTAMA
Tujuan Penggunaan Informasi : PEMBELIAN GENSET
Informasi Yang Diminta : PEMBELIAN GENSET

Pelayanan Informasi Oleh : Salmarianto

Tanggapan Pemberi Informasi : Dit de Informasikan kelahirhan Genset
dlm rangka mendirikan Gedung Baru.
Dinas PEP

Medan, 26 - FEB - 18

(AULIA RAHMATI PURBA)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	FADUHUSA LAIA.
NIK / NIP	:	1214031010690005.
Alamat	:	Helizalulu kee. Lahusa kab. Nisel.
Nomor Telepon	:	081376300991.
Asal Instansi	:	DPKD Nias Selatan.
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Informasi Yang Diminta	:	- kepastian Perposal bedah Rumah di kabupaten Nias selatan. - Mekanisme pengajuan Perposal untuk Program yang tersedia.
Pelayanan Informasi Oleh	:	Salmonianto
Tanggapan Pemberi Informasi	:	- Rehabilitasi Rumah tidak layak huni dari sumber dana APBDN Program BPS tahun 2019 masih menunggu SK Menteri PUPR. Nias selatan sebagai salah satu daerah yg diikutkan rehab Rehab RTLH sumber dana APBD Provinsi TA-2019 tidak ke Nias selatan - Proposal Pengajuan Rehab RTLH untuk pembiayaan DAK Perumahan disampaikan melalui aplikasi KRISNA Bappenas - Agar Pemkab Nisel merencanakan dan menereptkan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai permen PUPR 29/2018.


FADUHUSA LAIA.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Zahara.
NIK / NIP	:	
Alamat	:	Jl. Gatsu Subroto sy barat.
Pekerjaan	:	Sales government. (plat merah).
Umur	:	23 tahun.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Nomor Telepon	:	
Asal Instansi	:	Mitsubishi sardana
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Informasi Yang Diminta	:	penawaran pengadaan kendaraan.

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan, 21/9/2012.

Dikl.
Ditg.
(.....Zahara.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
NIK / NIP	:	Komisioner Lengkap
Alamat	:	Jl. Bilal 108 Medan 20230
Pekerjaan	:	Komisioner
Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Nomor Telepon	:	
Asal Instansi	:	KI - Sumut
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Visitasi & Peningkatan Keterbukaan Informasi
Informasi Yang Diminta	:	Ruang PPID dan lainnya.
Pelayanan Informasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Informasi	:	

Medan, 16 September 2015


Selma Komisioner
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : MUHAMMAD YUSUF
NIK / NIP : 196703292007011028
Alamat : Jln. VETERAN Lt. SULOARJO NO 30
KAB DELI
Pekerjaan : GURU.
Umur : 52 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Nomor Telepon : 085372224940
Asal Instansi : SMA N 3. KAB DELI
Tujuan Penggunaan Informasi : UNTUK SEKOLAH
Informasi Yang Diminta : PENJELASAN TENTANG AKA
SMA N 3. K. DELI

Pelayanan Infomasi Oleh : BAIK.

Tanggapan Pemberi Infomasi :
Alokasi pembangunan Prang kelor Baw ; tidak tersedia
di Dinas KEP PROVSU. Informasi dari cabang dinas Pendidikan
tsb harus di cek lagi ke Dinas Pendidikan provinsi Sumut
Bidang SMA atau Sub Bagian Program.

Medan, 17 SEPTEMBER 2019


MUHAMMAD YUSUF

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama : AGUSTINA KETAREN .
NIK / NIP :
Alamat : JL. JAMIN OTINTING 81 .
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA .
Umur : 43 TAHUN .
Jenis Kelamin : PEREMPUAN .
Nomor Telepon : 0821 34613372 .
Asal Instansi : -
Tujuan Penggunaan Informasi : INFORMASI BANGUNAN DIPNBOIR CUNGAJ .
Informasi Yang Diminta :

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan, 17 SEPTEMBER 2019 .

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: Dian Kusumawardhani
NIK / NIP	: 19760202204122003
Alamat	: Jln Pattimura No. 20 Ged. 5 DPWW
Pekerjaan	: Lautir 3 Bid. Pemantauan dan evaluasi
Umur	: 43 th
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Telepon	: 08567193679
Asal Instansi	: BPIW PUPR
Tujuan Penggunaan Informasi	: U/ Kegiatan pemantauan dan evaluasi
Informasi Yang Diminta	: Sebagai masukan dalam penyusunan program pengembangan kawasan. Data program pemb. infrastruktur bidang PUPR ta. 2015 - 2019 kusan dang APBD.
Pelayanan Informasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Informasi	:

Medan,7..... Oktober 2019



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Binsang, M. Ruyda
NIK / NIP	:	12 71 19 17 11 75 0003
Alamat	:	Jl. Tirta
Pekerjaan	:	Konsultan
Umur	:	43
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Nomor Telepon	:	0852 8216 3821
Asal Instansi	:	PT. Agra Artha Abadi
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Pemohonan data
Informasi Yang Diminta	:	Data terkait kegiatan Penyusunan Peraturan zonasi hutan provinsi
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan,

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : BESTAKI
NIK / NIP : 19651231 200906 1 016.
Alamat : Hamparan Perak.
Pekerjaan : PNS.
Umur : 52 Th.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Nomor Telepon : 0813 9653 3013.
Asal Instansi : Kantor Camat Hamparan Perak.
Tujuan Penggunaan Informasi : Mengantarkan Berkas Isi Bedarah.
Informasi Yang Diminta : H. Perak.

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan, 16-Sep-2019


(.....Bestani.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : FALSAL
NIK / NIP : 1981124 2010 01 1003.
Alamat : H. PERAK.
Pekerjaan : PNS.
Umur : 34 thn.
Jenis Kelamin : pria.
Nomor Telepon : 081362000684.
Asal Instansi : Kantor Camat H. perak.
Tujuan Penggunaan Informasi : Menghentikan Berkas
Informasi Yang Diminta : SEI BEDERAH.

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan, 16 SEP 2015.


(FALSAL)

Nama	: CHAIRIL EDWIN
NIK / NIP	: 196307131993031011
Alamat	: JL. TEMPURAI CECTARI 20 NO. 48
Pekerjaan	: ASN
Umur	: 56
Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
Nomor Telepon	: 082277700311
Asal Instansi	: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 . H. P
Tujuan Penggunaan Informasi	: MENBANTAR BERRAS.
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : HADI SAPUTRA
NIK / NIP : 1219031006890004
Alamat : PANDAH
Pekerjaan :
Umur : 30
Jenis Kelamin : LKIA
Nomor Telepon : 085274956111
Asal Instansi : BAPPEDA T.T
Tujuan Penggunaan Informasi : E - SURUT
Informasi Yang Diminta :

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan,

()

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : AHMAD IBNU KHALDU ST
NIK / NIP : 19850010201903 1 002
Alamat : PANDAN
Pekerjaan : PNS
Umur : 34
Jenis Kelamin : PRIA
Nomor Telepon : 0852622 66694
Asal Instansi : BAPPEDA TAPTEN 6
Tujuan Penggunaan Informasi : E-SUMUT
Informasi Yang Diminta :

Pelayanan Informasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Informasi :

Medan,

14/01/2024
15/01/2024



(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama : Yoseph P
NIK / NIP : 416.31. 6171149 063.100
Alamat : Balitang Putr
Pekerjaan :
Umur : 54
Jenis Kelamin : Laki
Nomor Telepon : 0812 80600094
Asal Instansi :
Tujuan Penggunaan Informasi : Data Siluman Pabrik Melaka
Informasi Yang Diminta : Siluman

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan,

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

*Berita Yang Telah Tayang Di Websiten Dinas
Perumahan Dan Kewascan Permukiman Provsu
Telah 2019*



lantor, pulang lebih awal atau tidak ikut APRL pagi akan dibenarkan pemotongan Tujuan dan Tambahan Penghasilan (TTP).

Search Search

Berita Terbaru

- [illegible]

February 4, 2019 Berita & Kegiatan

Rapat Awal Penyusunan Renja Tahun 2020 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu

Medan – Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan rapat awal dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 di Aula Kantor Dinas PKP Provsu. Acara di buka oleh Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Peserta yang hadir merupakan tim yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun Anggaran 2020.



Dalam pengarahannya, Ida Mariana menyampaikan setiap Pokja selanjutnya dapat menyusun Renja sesuai dengan tupoksi pada bidang masing-masing. Selain itu para kepala bidang dapat menyusun rencana program yang bukan hanya pada kegiatan fisik saja, namun untuk kegiatan database. Untuk mendukung penempatan PERHEN PUPR NO 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat agar para bidang mewujudkannya ke dalam bentuk kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya setiap usulan yang terkait dengan kegiatan kawasan permukiman untuk di sinkronkan dengan SK KWS kumuh. Dalam

rangka kegiatan RTLH telah dibentuk tim sosialisasi RTLH yang selanjutnya agar segera di tindak lanjuti dan untuk pemencanaan selanjutnya pada daerah KSP harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota, ujmnya.

Pada kesempatan tersebut Salmarianto selaku Kasubbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik menyampaikan bahwa untuk menempkan Permen PUPR NO 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, khususnya pada SPM Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) jenis pelayanan deseryitu Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi dan Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota. Oleh sebab itu para pokja dapat menyesuaikan kegiatan baru dengan permen tersebut. Selain itu para pokja di hampkan untuk segera melakukan pendataan dan survei lokasi sesuai dengan bidangnya untuk Tahun Anggaran 2020, ujmnya.



Pada Rapat tersebut juga dilaksanakan diskusi/debat tiap-tiap Pokja untuk melakukan pembahasan usulan kegiatan. (Ded)

Search

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERSTAKA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- BANGGUDA RPSPAP Menegakan/Atur Dan Gaur Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI HARI BAKTI PU KED-74
- FOCUS GROUP DISKUSI BROW (FOS) LANJUTAN, PERGERAKAN PERNYAPAN DOKUMEN KPSD BERBANGSA TERINTISIRANI BANGI PEKERJA KEL. SEI MANGOLEI
- BIKEROTISIR BANG BANGI BANGA MEMBAKOR SUMUT BERMAKABU

February 27, 2019 Berita & Kegiatan

REI Bisa Menjadi Organisasi Yang Terdepan Dalam Pengadaan Perumahan MBR Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat

Medan – REI Sumatera Utara melakukan acara silaturahmi dengan stakeholders dan dunia Perbankan sekaligus perayaan HUT REI Sumut yang ke 47 di Medan selase 26 Februari 2019 kemarin.



Kegiatan ini dihadiri oleh DPP REI, DPD REI dan seluruh anggota REI Provinsi Sumatera Utara. Gubsu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Hadase Manurung menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja sama dan dukungan yang telah ditunjukkan DPD REI selama ini terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyediakan perumahan untuk masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada acara tersebut dilakukan pemotang tumpeng dan diberikan kepada Hadase Manurung mewakili Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Ketua REI Sumut, Ir. Andi Atmaka Penggebean menyampaikan perayaan ulang tahun ini dilakukan oleh seluruh organisasi REI yang ada di masing-masing Provinsi, sedangkan untuk puncak acaranya akan diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya organisasi REI ini semakin tumbuh pesat sehingga dapat semakin memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat di masa yang akan datang. [Dadi]



Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Rancangan RPJRP Mengajukan Acaan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT ICH MARIANA HADRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN PERCEPATAN PENTAPAN DOKUMEN RPIBU RUTUWARA TERINTEGRASI BANG PEKERJA KEK SEI MANIKAI
- SINERGIITAS BAK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMAKARTAD

March 5, 2019 Berita & Kegiatan

Tema Rakortek "Menyongsong Pembangunan 2020-2024 Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Yang Selaras Dan Terintegrasi"



PDAND, Koordinasi Teknis Pemecanaan Pembangunan (Rakortek) Tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan di Grand Inna Huam, Padang mulai tanggal 25 Februari/d 1 Maret 2019. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo. Dalam sambutannya Hadi menekankan lima hal yang menjadi catatan penting bagi para peserta Rakortekbang dengan mengacu pada usulan RKP 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Prioritas

Nasional Tahun 2020 dengan menitikberatkan pada program kerja, yaitu: 1. Pembangunan manusia, 2. Penguatan korektivitas, 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi, 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air, dan 5. Stabilitas keamanan nasional. Adapun lima yang diunggulkan adalah "Menyongsong Pembangunan 2020-2024 Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Yang Selaras Dan Terintegrasi".

Pelaksanaan Rakortekbang tahun ini terdapat 24 desk yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah serta desk Pemerintahan Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen dan Komendagri dalam memfasilitasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada saat kegiatan desk sektor permukiman, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh Ida Marlene selaku Kepala Dinas. Kesempatan tersebut turut dihadiri oleh Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota Se-Sumatera Utara. Adapun usulan yang disampaikan oleh Ida Marlene adalah kegiatan dari sumber dana APBN yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2020 senilai



800 milyar rupiah yang terdiri dari usulan pembangunan rumah susun, rumah khusus nelayan, perbaikan rumah melalui rumah swadaya dan bantuan PDU Penunahan. Sebagai tindak lanjut diskusi desk, akan dilakukan verifikasi kesiapan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020.

Rakortekbang 2019 diselenggarakan dalam dua tahap berdasarkan regional, yaitu regional 1 dan regional 2. Untuk regional 1 terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali yang berlangsung sejak tanggal 25 Februari hingga 1 Maret 2019. Sementara untuk regional 2 terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB dan Papua yang akan diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 11 hingga 15 Maret 2019. [Dadi]

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Rancangan RPJRP Mengajukan Acaan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT ICH MARIANA HADRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN PERCEPATAN PENTAPAN DOKUMEN RPIBU RUTUWARA TERINTEGRASI BANG PEKERJA KEK SEI MANIKAI
- SINERGIITAS BAK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMAKARTAD

March 11, 2019 Berita & Kegiatan

Dinas PKP Sumut buka Stand di PRSU Tahun 2019



Medan – Dalam rangka mendukung gelaran PRSU Tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu peserta pada ajang tersebut.

Gelaran PRSU yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara pada Jum'at malam (8/3) dengan mengusung tema PRSU Now Lebih Keren Dengan Pesona Sumatera Utara Yang Bermartabat diharapkan menjadi gelaran yang dapat membuat masyarakat senang, sehingga pelaksanaannya tidak boleh main-main.

Dinas PKP Sumut pada gelaran PRSU kali ini menampilkan beberapa foto-foto dan video dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu turut pula di-

tampilkan maket pembangunan rumah relokasi korban bencana alam di Siosar dan rencana pembangunan gedung kantor yang mengusung konsep arsitektur hijau.

Dengan gelaran PRSU ini, Dinas PKP Sumut sudah mengambil peran untuk menyampaikan ke masyarakat tentang kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara dan harapannya adalah yang pertama bagaimana agar tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni di Sumut sampai periode Tahun 2023, kedua bagaimana strategi agar masyarakat yang belum punya rumah bisa memiliki rumah serta yang ketiga kebutuhan akan rumah bagi korban bencana bisa diminimalisir dengan adanya pembangunan perumahan bagi korban bencana yang telah dilakukan dan disebarkan oleh Pemerintah, ujar Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Hal itu merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Bapak Gubernur yang pertama untuk mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dan memiliki rumah yang layak huni, ujarnya.

Gelaran PRSU Tahun 2019 berlangsung selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 8 Maret sampai dengan 8 April 2019. (dedi)

March 11, 2019 Berita & Kegiatan

Acara PRSU Tahun 2019 Resmi dibuka, GUBSU : PRSU hajatan yang ditunggu-tunggu rakyat, jangan dibuat main-main



Medan – Gubernur Sumatera Utara membuka secara resmi gelaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2019 di Tapani Daya jalan Gatot Subroto Medan Jum'at malam (8/3). "Acara seperti ini adalah lebaran untuk rakyat Sumatera Utara, semua harus senang, saya yakin rakyat dan anak Sumut sangat mendambakan kegiatan seperti ini. Untuk itu yang akan datang harus 4-5 kali lebih baik, tidak boleh dibuat main-main," ujar Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Edy mengajak

seluruh Bupati/Walikota di Sumut untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan PRSU. "Tempat ini harus terawat, harus dibuat tempat yang menyenangkan rakyat, saya rasa bisa, bupati dan walikota ayo kita pikirkan bersama," ujarnya. Adapun tema yang diusung adalah PRSU Now Lebih Keren Dengan Pesona Sumatera Utara Yang Bermartabat.

Pembukaan secara resmi PRSU 2019 ditandai dengan pemukulan Gongdang Sembilan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut Sabrina, dan Wakilpolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto serta didampingi bupati/walikota se Sumut. (dedi)



Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUDUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Rancangan RPKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYAPAN DOKUMEN KPB RUJUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKELI
- SINERGISITAS BAK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUDUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Rancangan RPKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYAPAN DOKUMEN KPB RUJUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKELI
- SINERGISITAS BAK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

March 28, 2019 Berita & Kegiatan

RAPAT LANJUTAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MEDAN



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Melakukan Rapat lanjutan sinkronisasi pembangunan kawasan permukiman kumuh kota medan pada hari selasa tanggal 28 Maret 2019 di Aula Kantor Dinas PKP Provsu. Acara rapat dibule oleh Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan pelaksanaan rapat sebagai tidak lanjut rapat sebelumnya pada tanggal 19 Maret 2019 yang merakamandasilan Kawasan Mangrove untuk dijadikan sebagai kawasan Ekowisata. Pada kesempatan tersebut turut pula hadir Nurliya Ginting selaku kepala Departemen Teknik arsitektur Universitas Sumatera Utara

yang memaparkan beberapa konsep Perencanaan Kawasan dipinggiran Sungai Deli dan sekitarnya.

Selain pembahasan konsep atau ide-ide perbaikan di kawasan pinggiran sungai deli, dalam rapat tersebut juga membahas penengahan kawasan Sicanang yang akan ditata menjadi kawasan Ekowisata. Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan bahwa sebagai langkah awal akan dilakukan kunjungan lapangan ke Sicanang pada hari jemiis tanggal 29 maret 2019 yang akan datang, setelah pertemuan untuk kesepakatan pelaksanaan bedah rumah, dengan melibatkan unsur camat, lurah serta masyarakat. Selanjutnya dibuat design bangunan dengan melibatkan unsur Departemen Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara, tambahhya.

Sebagai bentuk dukungan, Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan telah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak untuk penengahan Kawasan Sicanang, di samping sebagai tempat objek ekowisata selanjutnya kawasan Sicanang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar jelaas Tondi selaku peremkilan dari Dinas PPTR Kota Medan.

Peserta yang hadir pada rapat tersebut diantaranya Bappeda Provsu, Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Bappeda Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Departemen Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara dan Koordinator Kota Kotaku Kota Medan. (dedi)

Search

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Ranperda RPJRP Menupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYAPAN DOKUMEN KPB RUJUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKET
- SINERGISITAS BAK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

March 13, 2019 Berita & Kegiatan

Kadis PKP Provsu Menyematkan Akrilik Sebagai Tanda Rumah Adat Yang Telah Direnovasi Difungsikan Sebagai Homestay



Baldira – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu membantu penghuni rumah adat dengan meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni. Rumah adat ini direnovasi agar dapat menjadi homestay. Homestay ini ada berada di Desa Baldira Kecamatan Baldi Raja Kabupaten Humbang Hasundutan. Ida Mariana selaku Kadis PKP Provsu menyematkan akrilik sebagai tanda rumah ini dapat difungsikan sebagai Homestay senin (11/3). Ida Mariana mengharapkan para penghuni rumah yang telah di berikan bantuan/renovasi rumah adat menjadi homestay supaya di jaga dan dirawat dengan

baik. Agar para pengunjung yang datang dapat singgah di homestay menjadi nyaman dan aman, bisa menambah penghasilan bagi penghuni atau pun masyarakat sekitar serta mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama proses pembangunan renovasi ini berjalan dengan lancar. Penerima bantuan pada kesempatan tersebut diwakili oleh Hotlina Baldira mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah merehab/memperbaiki rumahnya dan membangun fasilitas kamar mandi dan fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga kami pun yang tinggal di rumah ini menjadi nyaman, ujarhya. (dedi)

Search

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Ranperda RPJRP Menupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYAPAN DOKUMEN KPB RUJUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKET
- SINERGISITAS BAK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

April 7, 2019 Berita & Kegiatan

REI Sumut bersedia merehabilitasi rumah tidak layak huni melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan



Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi menerima Dewan Pengurus Daerah (DPD) Reslestat Indonesia (REI) Sumatera Utara di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019. Rombongan audiensi dipimpin oleh Ir. Andi Atmoko Panggabean selaku Ketua DPD REI Sumut.

Kebutuhan rumah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan rumah, secara konsisten dalam 3 tahun terakhir REI Sumut sudah membangun lebih dari 50.000 rumah. DPR REI Sumut sebagai salah satu organisasi profesi yang bergerak di bidang perumahan menyatakan komitmen untuk berkontribusi mendukung pembangunan di

Sumatera Utara dalam menuju Sumut Bermartabat. DPR REI Sumut bersedia memberikan dana tanggung jawab sosial untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni dan lingkungan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Gubernur Sumatera Utara didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ida Mariana dan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Basrin Yunus Tanjung dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kepedulian DPD REI Sumut, serta berharap agar segera diambil langkah nyata mengatasi masalah perumahan di Sumatera Utara. Untuk rumah yang akan direhabilitasi dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Pada akhir pertemuan dilakukan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPD REI Sumatera Utara untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan lingkungan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Search Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SERPANA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI
- Rancangan RPSAP Menjabarkan Aspek Dan Sisi Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI BAKTI PI KE-74
- FOCUS GROUP DISKUSI (FGD) LAKSITAN, PERCEKAMAN PERUMPAH DOKUMEN RPSB RUMAHKITA TERINTERAKSI BAGI PEKERJA KEL. SEI WAKOLEI
- SIKEROTISAS BAKI, KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMAKARTABAT

April 15, 2019 Berita & Kegiatan

Penanganan Hunian Korban Bencana Alam Dan Hunian Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Dapat Diterapkan Untuk Sebaik-Baiknya Bagi Masyarakat



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Plaza Hotel, Kamis 04 April 2019. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membahas rencana kerja dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKP Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman, ujar Ida Mariana selaku Ketua Panitia.

Acara dibuka langsung oleh Sabrina, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sabrina menghampakan pelaksanaan kegiatan ini mampu menghadirkan proses penyusunan rencana kerja (renja) yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen rencana kerja yang semakin berkualitas. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR NO 29/PR/TH/2018 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat untuk penanganan hunian korban bencana alam dan hunian yang terkena relokasi program pemerintah dapat diterapkan untuk sebaik-baiknya bagi masyarakat, tambahnya.

Namun, yang mengahai acara pada kesempatan tersebut adalah perwakilan dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI, Bappeda Provinsi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Peserta yang hadir berasal dari Bappeda dan OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman se-Sumatera Utara. [ded]

Search Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SERPANA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI
- Rancangan RPSAP Menjabarkan Aspek Dan Sisi Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI BAKTI PI KE-74
- FOCUS GROUP DISKUSI (FGD) LAKSITAN, PERCEKAMAN PERUMPAH DOKUMEN RPSB RUMAHKITA TERINTERAKSI BAGI PEKERJA KEL. SEI WAKOLEI
- SIKEROTISAS BAKI, KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMAKARTABAT

April 28, 2019 Berita & Kegiatan

Peduli Anak Yatim Piatu, Dinas PKP Provsu Berikan Bantuan Sembako Ke Panti Asuhan Putra Ar- Ridho



Medan – Dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Utara ke 71 Tahun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan sembako ke Panti Asuhan Putra Ar-Ridho, Jl. Bajak IV, Medan, [22/4]. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas PKP Ida Mariana dengan ditemani beberapa orang pegawai.

Kunjungan Ida Mariana disambut langsung oleh Pengurus Panti asuhan Putra Ar-Ridho Samani Sugianto.

Ida Mariana mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada sesama

manusia dengan saling membantu terutama kepada warga yang kurang mampu semata-mata untuk mengurangi beban hidupnya.

"Anak-anak yang berada di Panti Asuhan ini butuh kasih sayang dari kita, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli dengan mereka. Saya berharap dengan bantuan ini dapat membantu mereka dan nanti nya saat dewasa kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa," Pungkasnya. [dw]

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA WENJIBER PERATURAN PERKAWASAN DININGKE PROVISI
- Rancangan RPPKP Mengetahui Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI HARI BAKTI PIU K-71
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LAKSITAN, PERCENDIA PERUMAHAN DOKUMEN KPRIS PERUMAHAN TERINTRODUSI BAGI PEKERJA KEL RI MANDALI
- BERKEMBANG BAKI KUNCI UTAMA MEMBAKOR SUMUT BERHARTABE



June 1, 2019 Berita & Kegiatan

Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila Perlu Dijadikan Sumber Inspirasi "Politik Harapan" Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara



Medan – Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila tanggal 01 Juni 2019 bertempat di halaman Kantor Dinas PKP Provsu. Pada kesempatan tersebut bertindak sebagai Inspektur upacara Syahbudi Singaralelu Sekretaris Dinas dan yang bertindak sebagai Komandan upacara Selmatendo selaku Kasubag Program Dan Akuntabilitas Informasi Publik. Peringatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

Sesuai dengan sambutan Kepala BPIP yang dibacakan oleh Syahbudi, melalui Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila Perlu Dijadikan Sumber Inspirasi "Politik Harapan" Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Kita semua harus terus menerus konsisten memelaksanakan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia, termasuknya.

Upacara Hari Lahir Pancasila dihadiri oleh para pejabat eselon III, eselon IV, dan staf di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta pimpinan dan staf SMT Pengedialan Perumahan Provsu. [ded]



Acara buka bersama dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, Kepala SMT Pengedialan Perumahan, ASN dan non ASN di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. [ded]

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA WENJIBER PERATURAN PERKAWASAN DININGKE PROVISI
- Rancangan RPPKP Mengetahui Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI HARI BAKTI PIU K-71
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LAKSITAN, PERCENDIA PERUMAHAN DOKUMEN KPRIS PERUMAHAN TERINTRODUSI BAGI PEKERJA KEL RI MANDALI
- BERKEMBANG BAKI KUNCI UTAMA MEMBAKOR SUMUT BERHARTABE



Juni 10, 2019 Berita & Kegiatan

Mari Kita Terus Untuk Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Memelihara Moral, Kehormatan, Dan Martabat ASN Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat



Medan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan apel pagi perdana setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Senin tanggal 10 Juni 2019. Apel perdana dilaksanakan bertempat di halaman Kantor Dinas PKP Provinsi. Pada kesempatan tersebut bertindak sebagai pimpinan apel Ida Hartono selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi.

Dalam Sambutan yang dibacakan oleh Ida Hartono, Gubernur dan Wagub menyampaikan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah" kepada seluruh ASN di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara "Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir Dan Bathin". Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan pilihan yang jernih membangun Sumatera Utara yang kita cintai ini menjadi aman, dan bermartabat serta mendapat ridho dari Allah SWT. Selanjutnya mari kita terus untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara moral, kehormatan, dan martabat ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, jasanya.

Kepada para ASN yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengurangan tunjangan tambahan penghasilan sampai penghapusan hukuman disiplin, termasuknya.

Apel pagi perdana dihadiri oleh Sekretaris, para pejabat eselon III, eselon IV, dan staf di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, pimpinan dan staf SMT Penyediaan Perumahan Provinsi. Setelah apel seluruh ASN beresam dengan Kepala Dinas dan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas PKP Provinsi. [ded]



Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKUPA VERBODER PERATUBAN PERUMUKAN DINWAKE PROVINSI
- Kepala BPKP Urusan Acara Dan Saat Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perumahan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN SUMUT IDA HARTONO HADIRI WAKIL PA KOTA
- FOCUS GROUP DISKUSI (FGD) LAKSITRA, PERCERITA PERUMUKAN SUMUTER APTA BERNAMA TERWISDANI BADI PERKUSA KES BDI WAKESDI
- DISKUSI BAK KURDI STRUK WERWANDER SUMUT & CEMARTABAT



Juni 26, 2019 Berita & Kegiatan

HALAL BIL HALAL MENJADI MOMENT MENINGKATKAN HUBUNGAN SILATURAHIM DAN SEMAKIN MENINGKATKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA



Medan - Keluarga besar Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara halal bil halal yang bertempat di aula kantor Dinas PKP Sumut, Rabu 26 Juni 2019. Acara ini merupakan agenda setiap Tahun dan bertujuan untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi antara ASN dan non ASN di lingkungan Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Ida Hartono selaku Kepala Dinas PKP Provinsi menyampaikan bahwa, halal bil halal menjadi moment meningkatkan hubungan silaturahmi dan semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semakin mempererat pekerjaan dan seluruh ASN dapat bekerja dengan lebih baik lagi, ikhlas dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya agar ASN dapat memberikan inovasi yang baru terkait dengan tupai Dinas dan mudah-mudahan acara ini dapat menjadi berkah untuk kita semua, ujanya menurut sambutan.

Acara dilanjutkan dengan doa, tobi dan makan siang bersama. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, SMT Penyediaan Perumahan Provinsi dan ASN maupun non ASN di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. [ded]

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKUPA VERBODER PERATUBAN PERUMUKAN DINWAKE PROVINSI
- Kepala BPKP Urusan Acara Dan Saat Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perumahan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN SUMUT IDA HARTONO HADIRI WAKIL PA KOTA
- FOCUS GROUP DISKUSI (FGD) LAKSITRA, PERCERITA PERUMUKAN SUMUTER APTA BERNAMA TERWISDANI BADI PERKUSA KES BDI WAKESDI
- DISKUSI BAK KURDI STRUK WERWANDER SUMUT & CEMARTABAT



July 16, 2019 Berita & Kegiatan

Pembinaan Tenaga Fasilitas Lapangan, Koordinator Fasilitas dan Tim Teknis Kabupaten/Kota



Medan – Dalam rangka pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan "Pembinaan Tenaga Fasilitas Lapangan, Koordinator Fasilitas dan Tim Teknis Kabupaten/Kota" di Hotel Emerald Garden Medan, tanggal 11 – 12 Juli 2019.

Delapan puluh lima Kepala Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menghadiri kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga fasilitas lapangan, koordinator fasilitas dan tim teknis kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan RTLH.

Pada kegiatan pembinaan ini tenaga fasilitas lapangan, koordinator fasilitas dan tim teknis dibekali cara mendampingi masyarakat serta dengan pengetahuan teknis membangun rumah, menyusun RAB, memilih/belanja bahan bangunan dan lain sebagainya. Dengan bekal pengetahuan ini diharapkan tenaga fasilitas mampu bekerja lebih baik, dan masyarakat dapat menerima hasil pekerjaan dengan senang hati, ujanys.

Namun pada kegiatan tersebut berasal dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Tim Konsultan Manajemen Provinsi. Sedangkan peserta merupakan tim teknis dan Fasilitas masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan RTLH. [died]

Menu

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERSAMA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RI MELAKUKAKAN KEGIATAN PELATIHAN
- RANGKAIAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROGRAM POKOK KEGIATAN DAN PROGRAM POKOK KEGIATAN
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA MELAKUKAKAN KEGIATAN PELATIHAN
- FOCUS GROUP DISKUSI (FGD)
- LAKUKAKAN PERCEKOKAN PERUMAHAN
- DOKUMEN KEGIATAN PELATIHAN
- TERKUTIP RANGKAIAN PELAKSANA KEGIATAN
- BERKUTIP RANGKAIAN PELAKSANA KEGIATAN



July 13, 2019 Berita & Kegiatan

Bantuan perumahan berbasis komunitas adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan bantuan perumahan kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)



Medan – Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Penyediaan Perumahan membuat program pembangunan baru perumahan berbasis komunitas yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mendukung program tersebut dilaksanakan rapat pembahasan kesiapan pembangunan baru perumahan berbasis komunitas Tahun 2019 yang diadakan di Grand Mercure Hotel Medan tanggal 10 Juli 2019 dan dihadiri oleh 5 (lima) Kabupaten/Kota calon penerima bantuan yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai dan Kota Padangsidimpuan.

Acara diawali dengan sambutan oleh Kadis PKP Provinsi Ida Mariana yang menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan. Selanjutnya dalam arahannya Direktur Rumah Swadaya menjelaskan bahwa program ini merupakan program yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama sekali dilaksanakan di Sumut. Untuk besaran dana yang diberikan sebesar 35 juta dengan rincian 20 juta untuk belanja bahan dan 5 juta untuk upah kerja, ujarnya. Harapannya agar kegiatan ini sebagai pemicu memunculkan swadaya masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan perumahan tersebut, tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan ekspose kesiapan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan untuk melaksanakan program pembangunan baru perumahan berbasis komunitas. Sedangkan keesokan harinya akan dilaksanakan kunjungan lapangan ke semua lokasi yang telah diusulkan. [dedi]

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MELAKUKAN PERATURAN PERUBAHAN DITINGKAT PROVINSI
- Rengasde RPKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI HARI BAKTI PS KES-74
- FOCUS GROUP SINGGAMAH (FOS)
- LAJUTAN, PERCERITA PENYAPAH DOSEN KPSI RUSMANA TERINTERAKSI SADI PEKERJA KES KES MANDALI
- BIKEROSTAR BAKI KUNCI STUKA MELAKUKAN SEMUT BERMAKNA



- [illegible]

August 5, 2010 Letter to Congress

[illegible]

Salah satu cara untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok adalah dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang memiliki distribusi normal. Uji t dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang memiliki distribusi normal. Uji t dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang memiliki distribusi normal.

bio & mamalia Indonesia yang layak dan nyaman.

Sajian Berkelanjutan Infrastruktur Perumahan Ekstrem dan Perumahan Sementara di FLEET Bina Sempurna menunjukkan realisasi persentase pembangunan perumahan FLEET dari tahun 2015 hingga 2018 sebagai berikut. Pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan persentase pembangunan perumahan FLEET yang berbeda-beda. Pada tahun 2015, persentase pembangunan perumahan FLEET adalah 100%. Pada tahun 2016, persentase pembangunan perumahan FLEET adalah 100%. Pada tahun 2017, persentase pembangunan perumahan FLEET adalah 100%. Pada tahun 2018, persentase pembangunan perumahan FLEET adalah 100%.

Frngg 50 Juli 2019, Kabupaten Beraut melaksanakan kegiatan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu milik PT. Beraut Tebu dengan luas lahan 4.500 hektar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Beraut dengan melibatkan 100 orang tenaga kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tebu di Kabupaten Beraut.

Program studi Sarjana Teknik Fisika (STF) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FTUB) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman di bawah. Kami menyadari pentingnya bantuan pemahaman di bawah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah di daerah, antara lain, dapat diidentifikasi di beberapa indikator diantaranya: rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan, tidak ada data pemerintahan yang valid dan terintegrasi yang diukung dengan sistem berbasis informasi, dukungan FSI & BSI bagi pemerintahan yang masih terbatas, anggaran informasi belum dianggarkan dan pemanfaatan daerah sebagai pengungkit ekonomi. FSI & BSI diarahkan dari, anggaran sebagai pengungkit pengembangan daerah (paliwid-ders) & BSI sebagai pemerintahan dan anggaran partisipasi FSI & BSI dan em-pembiayaan bantuan pemerintahan pemerintahan.

Menyampaikan hasil diskusi dan permasalahan yang dihadapi. Disini, Sementara P8 P2 menyakini bahwa P8 P2 sebagai bentuk poliklinik STE P8 ersitas perlu didukung dan melibahkan bareng format agar dapat berjalan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ekonomi daerah yang berkembang. P8 drasa sebagai wujud komitmen poliklinik STE P8 ersitas P8 ersitas untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Gak ada, sebagai perwakilan dari, P8 dapat lebih aktif dan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan poliklinik.

Berkas pemerkahan pasokan Garam di Bera sangat diperlukan kerana dalam rekod data ini diperkahan setiap permekahan Quota pemerkahan sehingga minimal 10,000 unit, agar rumah yang ready stok dapat dimili Hilir Garam dengan mendapat manfaat dari PLT. Hal ini akan MPR di angkan di Hilir Segala Sinar Perumahan dan Sinar Perumahan Provinsi Garam. Bera Ida Harjuna, Lambok.

Argoelan et al. HSC of the FICHA did not address the benefits of training in the participation of CS Hyung to the CS in the management of the health care system.





Page 1 of 2019 Berita & Kegiatan

Bank Sumut Menjadi Tujuan Masyarakat Untuk Mewujudkan Impian Mereka Agar Bisa Memiliki Rumah



Medan – Kadis PKP Provinsi Ida Mariana Menghadiri Acara promosi dan sosialisasi kredit Pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang di selenggarakan oleh Bank Sumut dan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Aula Gedung Bank Sumut, Jl. Imam Bonjol, Medan Kamis 8 Agustus 2019. Acara tersebut, dihadiri oleh Perwakilan OJK Yogi Sukandar, dan Seluruh jajaran Bank Sumut, serta para pengembang Perumahan. Pembukaan acara dilakukan oleh Pimpinan Divisi Ritel Bank Sumut, Syafrialsyah. Dalam sambutannya mengharapkan agar acara ini berlangsung lancar dan Bank Sumut, Menjadi Tujuan Masyarakat untuk mewujudkan impian mereka agar bisa memiliki rumah. Pada kesempatan tersebut, Kadis PKP Provinsi berharap Bank Sumut, Menjadi Pionir dalam program pemerintah sebagai tempat fasilitas bagi masyarakat yg ingin memiliki Rumah dengan KPR yang ringan.

Penyediaan dari Kementerian PUPR dihadiri oleh Afiansari mewakili bagian divisi pemasaran. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rumah sejahtera yang dibiayai KPR sebagai FLPP dalam kondisi siap, Sehat dan Layak Huni yang meliputi, Atap, lantai, dan dinding serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan بهداشت bangunan. Selain itu terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM, Utilitas jaringan listrik, jalan lingkungan yang sudah dalam perawatan badan jalan, aspal dan lingkungan lingkungan. Ada pun standar rumah sejahtera FLPP maksimal tipe 36 dengan luas tanah minimal 60 m², dan lainnya.

Di akhir acara dilakukan pengundian Lucidraw dan foto bersama. (dedi)

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKUPRA WILAYAH PERANTARA PERKOTAAN BINTANG PROVINSI
- Rencana KPRP Waspada Ases dan Dampak Program Pemasaran Pembiayaan Di Bidang Pemukiman Dan Kawasan Perumahan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI HARI BAKTI PU RI-4
- KOCUS Q&A DISKUSI KPR (KPR) LAMUTAN, PERCEPATAN PERUMAHAN DO KURIR KPR RUGU MARI TERKONTAKSI KPR PERUMUKAN KURIR WANGREI
- GEMERLANTAS BAK KAWUTAMA WILAYAH SUMUT BERBANTUAN



Rap 2019, 2019 Berita & Kegiatan

Masyarakat Mendukung Normalisasi Sungai Badera



Medan – Dalam rangka pelaksanaan pilot project normalisasi Sungai Badera, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Balai Besar Sungai Wilayah II Sumut dan Kodam I Bukit Barisan melaksanakan Sosialisasi Rencana Normalisasi Sungai Badera dan Relokasi Warga bertempat di Balai Prajurit Melodan I Bukit Barisan, Jumat 09 Agustus 2019.

Acara dipimpin oleh Asisten Terkoris I (WATER) KASDAN VBB Perhutani Marpaung yang menyampaikan bahwa salah satu permasalahan di Kota Medan adalah terjadinya banjir. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan sungai dan saluran serta terjadinya penimbunan

yang berada pada sempadan sungai serta terjadinya sedimentasi dan penyempitan badan sungai yang salah satunya adalah Sungai Badera. Oleh sebab itu akan dilakukan pilot project penangan Sungai Badera, intinya. Dihasilkan adanya kerjasama dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat yang terbantu dampak normalisasi Sungai Badera agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, tambahnya.

Kadis PKP Provinsi Ida Mariani pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pertemuan ini diharapkan akan ada solusi yang terbaik untuk penanganan Sungai Badera. Acara ini merupakan tindak lanjut dari acara sebelumnya. Dan bagi masyarakat yang terdampak akan dilakukan penilaian spot oleh tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Oleh sebab itu masyarakat diharapkan segera melengkapi dokumen ataupun surat tanda bukti kepemilikan tanah. Sebagai tindak lanjut, setelah pertemuan ini pada tanggal 14 Agustus 2019 akan dilakukan Q round Breasting Normalisasi Sungai Badera di Kawasan Perumahan Bumi Auri.

Masyarakat pada prinsipnya mendukung kegiatan Normalisasi Sungai Badera ini, namun meminta agar proses ganti rugi tidak terlalu lama dan tidak merugikan masyarakat yang terdampak kegiatan normalisasi ini, ujar beberapa warga yang menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Acara diakhiri dengan pengumpulan dokumen/surat kepemilikan tanah masyarakat yang berada di lokasi Normalisasi Sungai Badera yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi atas masyarakat yang menguasainya. Turut serta menghadiri acara tersebut, Bappeda Provinsi, Dinas BDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi, Kanwil ATR/BPN Sumut, Bappeda Kota Medan, Dinas Perkim Deli Berdang, Dinas PUPR Deli Berdang, Koramil, Babinsa, Camat Helvetia, Kantor Jasa Penilai Publik dan masyarakat yang berada di lokasi Normalisasi Sungai Badera. (Red)



1 2 3 4

Search

Berita Terbaru

- * PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SELALU PRIORITISIRAN PERATURAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
- * RENCANA RPJMD KABUPATEN ACEH DARUSalam Program Penguatan Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- * KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SUMUT IDA MARIANA MADRIL NABILAUTIPU KELAHIRAN
- * KECERDASAN BERKUALITAS (KB) DAN JUTAN, PERCEPATAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN TERKAIT KAWASAN KAWASAN
- * SINGKAPURAN DAN KECERDASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN



Agust 16, 2019 Berita & Kegiatan

Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana Ikut andil dalam peringatan HUT RI Ke 74 Tahun



Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana Jadi Jurat memasak

Medan - Dinas PKP Sumut menyambut hari Kemerdekaan RI Ke 74 Tahun dengan berbagai macam perayaan. Untuk memeriahkannya, Panitia mengadakan perlombaan di antara rya lomba Balap Kano, Lomba keledang di dalam kandang, bulu tangkis, memasak dan lainnya. Perlombaan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas PKP Sumut tersebut dimulai tanggal 14 - 15 Agustus kemarin, diikuti oleh seluruh pegawai Dinas PKP Sumut.

Tujuan panitia mengadakan perlombaan adalah menciptakan kebersamaan tanpa memandang etnis, golongan, jabatan, dan agama tertentu serta menyampaikan pesan moral tentang perjuangan para pejuang yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini.

Dalam perlombaan memasak, Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana Mengambil Andil dari perlombaan tersebut yaitu sebagai Jurat memasak. Perlombaan yang diadakan tersebut menyuguhkan momen kebahagiaan tersendiri untuk para peserta, berikut Momen : [ded]



Agust 17, 2019 Berita & Kegiatan

Sumber Daya Manusia Sebagai Pilar Penting Penopang Pembangunan



Medan - Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke - 74, Dinas PKP Provsu melaksanakan upacara bendeng yang diadakan di halaman kantor Dinas Sebu [17/8]. Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Ida Mariana selaku Kepala Dinas dan Komandan Upacara oleh Dananto Bangun.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Ida Mariana menyampaikan bahwa hlmah terpenting dalam memperingati kemerdekaan kita harus dapat melestarikan dan melanjutkan nilai-nilai kejujuran para pejuang guna menggiat kemerdekaan dan melanjutkan program pembangunan.

Pada perayaan 74 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini mengambil tema "SDM Unggul, Indonesia Maju". Tema ini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang pembangunan suatu daerah atau negara, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan pengharapan Setya Lencana Karya Setya X Tahun, 100 Tahun dan 100 Tahun kepada para ASN yang telah berakti secara terus menerus dengan menunjukkan kecapaian, dedikasi, keuletan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi ASN lainnya. [ded]

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKUPA MELAKUKAKAN PERHIMPATAN PERKAWANAN SINGKAPUR PROVSU
- Rencanade RPKP Mengajukan Ajuan Dan Sesi Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perkotaan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN SUMUT IDA MARIANA MENDIRI HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISKUSI (FOG) LAKUKAN, PERENCANAAN PERKAWANAN DISKUSI KPRP PERENCANAAN TERKAIT RENCANA BANGUNAN KEMASUKAN
- SINGKAPUR BAKI KEMASUKAN DISKUSI KPRP BERKAWAN

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKUPA MELAKUKAKAN PERHIMPATAN PERKAWANAN SINGKAPUR PROVSU
- Rencanade RPKP Mengajukan Ajuan Dan Sesi Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perkotaan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN SUMUT IDA MARIANA MENDIRI HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISKUSI (FOG) LAKUKAN, PERENCANAAN PERKAWANAN DISKUSI KPRP PERENCANAAN TERKAIT RENCANA BANGUNAN KEMASUKAN
- SINGKAPUR BAKI KEMASUKAN DISKUSI KPRP BERKAWAN



[Search](#)

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERPAKAI KEWASUDAN PERATURAN PERUMAHAN DI BAWAH PERUMAHAN
- Rancangan RPKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SUMUT IDA HARANA HADIRI KURI SAKTI PB KETA
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCERATAN PERUMAHAN DOKUMEN KPR DAN RUMAH KOTA TERINTERAKSI SAKTI PEKERJA KEM. BEI MANOKI
- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SUMUT BERKAWASUDAN MEMBANGUN SUMUT BERKAWASUDAN

Agust 22, 2019 Berita & Kegiatan

Normalisasi Sungai Bedera sebagai Bentuk Tindak Lanjut Penanganan Banjir Di Kota Medan



Medan - Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi memimpin langsung *Groundbreaking* normalisasi Sungai Bedera yang berlokasi di Komplek Perumahan Bumi Auri. Acara diawali dengan laporan dari Kepala BWS Sumatera II Roy P. Pardede. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengungkap permasalahan banjir yang ada di Kota Medan yang salah satunya adalah normalisasi Sungai Bedera. Adapun pekerjaan yang dilakukan sepanjang ± 3.500 meter yang dimulai dari Jalan Gatot Subroto ke hilir dengan menggunakan alat berat berupa excavator.

Dalam sambutan dan arahan dari Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi

menyampaikan bahwa pelebaran sungai ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Hal ini disebabkan karena Kota Medan sering mengalami banjir pada waktu musim hujan yang dampak kerugian mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah. Sungai berfungsi menyejahterakan manusia, karena itu sungai harus dibenahi dari sekarang, tambahinya.

Diakhir acara dilakukan pengoreksian sungai Bedera yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut. Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Medan, Wakil Bupati Deli Serdang, Kesdam I Bukit Barisan, para pimpinan OPD, Camat, Lurah serta masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bedera. [dedi]





- P E R I N T A R P R O V I N G I S U W A T A R A
D I T A R A D E R P R O V I N G I S U W A T A R A
P E R A T O R A N P E R U M A H A N G A N D I T I N G I S U
P R O V I N G I S
- K a s a p a d a R E K P E N e n g a l a n A n a D a s
D a n a P e r g a n e P i d a l a n P a n h a n g a n
D i S i d a n g P a n h a n g a n D a s K a n a n
P a n h a n g a n
- K E P A D A D I N G I S P E R U M A H A N D A N
D I T A R A P E R U M A H A N D A N D I T A R A
D I T A R A D I T A R A D I T A R A D I T A R A
D I T A R A D I T A R A D I T A R A D I T A R A
- P O C O N G O R O P O C O N G O R O P O C O N G O R O
D I T A R A P E R U M A H A N D A N D I T A R A
D I T A R A D I T A R A D I T A R A D I T A R A
D I T A R A D I T A R A D I T A R A D I T A R A
- S I N I R O G I T A S D I T A R A D I T A R A
D I T A R A D I T A R A D I T A R A D I T A R A
D I T A R A D I T A R A D I T A R A D I T A R A

September 2012 Issue 2, Page 14

Kepala Dinas PKP Provinsi Kepulauan Riau didampingi Kasubag Program dan Manajemen melakukan presentasi yang terkait dengan keterbukaan informasi publik di hadapan Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Medan – Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi
melakukan presentase yang terkait dengan keterbukaan informasi
publik di Hadsip dan Komisioner Informasi Provinsi, Selasa 18/3/2014
di Kantor Komisi Informasi Provinsi. Kegiatan ini menandai klatifikasi UU Mo-
Lo Tahun 2008, yang mengamandatkan bahwa keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan
sebagai acuan yang berakibat pada kepentingan publik.

Presentasi ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas PKP Provinsi Idris Maris. Dalam Pemaparannya Idris Maris Mengatakan dalam beritubukan informasi publik, "kami akan melakukan informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan yang telah dilakukan Dinas PKP Provinsi kepada Masyarakat baik secara lisan ataupun dalam bentuk media informasi lainnya berupa booklet dan Baur."

Berita dengan penyempitan Ida Marisa, Komisioner Informasi
mengapresiasi hom kansen Dinas PKP Provinsi atas keterbukaan informasi publik. [ide0]

[illegible]



Senin, 04, 2018 08:41:22, Kegiatan

Dinas PKP Sumut Berpartisipasi Dalam Acara Hari Keluarga Nasional Ke XXVI Provinsi Sumatera Utara



LABURA – Gubernur Eddy Rahmayadi menghadiri Puncak penyusunan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tingkat Provinsi Sumut, di Lapangan Depakbola, Aek Kota Batu, Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (5/9).

Dalam sambutannya Eddy Rahmayadi mengatakan "Membinas keluarga kujihas, penuh perjuangan namun harus tetap disiplin sebab keluarga adalah benteng pertama yang harus dijaga dalam masyarakat," ujarnya, kepada masyarakat yang hadir saat itu.

Eddy juga mengemukakan agar dalam Keluarga diharuskan saling berkomunikasi, ibarat rumah tangga jangan seperti kuburan. Di kuburan ku sapi dan sunyi. Rumah juga jangan seperti di rumah sakit yang selalu kureng.

Sebaliknya, Rumah juga jangan seperti pasar yang riuh karena komunikasi tidak nyambung," tambahnya.

"Di masa milenial anak bisa mengelurkan keluh kesahnya. Sementara orang tua memberikan nasihatnya langsung," kata Eddy yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nuzul Eddy Rahmayadi.

Pada kesempatan tersebut, Kadis PKP Sumut, Ida Mariana menyampaikan bahwa Keluarga adalah pilar utama dalam kehidupan sehingga pembinaan baik berasal dari rumah yang layak sehingga untuk membangun Masyarakat Sumut yang bermartabat. Pemerintah wajib menyediakan rumah yang layak huni pula untuk masyarakat. Untuk mewujudkan itu Dinas PKP Sumut, memberikan bantuan bodas rumah untuk keluarga yang tidak mampu, ujarnya.

Di akhir acara Eddy Rahmayadi meresmikan rumah yg telah di bodas secara simbolis dengan memotong pita. (dedy)



Entri

Daftar

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUSAHA MENYUSUN PERATURAN PERUMAHAN DITINGKAT PROVINSI
- Rencana RPJEP Kabupaten Aceh dan Kota Program P3 dan Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SUMUT IDA MARIANA HADIR HARI BERTUKU KE-24
- FOCUS GROUP DISKUSI WAKIL LAKSUTAN, PENGEPAN PERUMAHAN DO KUMH KPSU KUMHAKA TERINTENSIFISASI PERUMAHAN KESKI MANGKEL
- GINERONGTAS BAKU KUMHUTAMA MENYANDONG SUMUT BERKATAKAT



Sepren berik, 2018 *Enka C. Edyana*

Tempat Belajar Tidak Boleh Kotor Karena, Lingkungan Yang Kotor Dapat Mengakibatkan Para Santri Jadi Sakit



MADINA – Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Mariana mendampingi Gubernur Edy Rahmayadi melakukan kunjungan kerja meninjau asrama santri di Pesantren Muhtafisulwahid Purbas Baru, Jumat (10/9).

Kunjungan tersebut disela-sela rangka meresmikan pembangunan sarana air minum yang dilengkapi untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang telah dibangun oleh Dinas P.K.P. Provinsi.

Di hadapan para santri, Edy Rahmayadi berpesan agar para santri menjaga kebersihan lingkungan asramanya.

Tempat belajar tidak boleh kotor. Karena, lingkungan yang kotor dapat mengakibatkan para santri terkena penyakit.

"Bersihkan, bukan hanya bersih orangnya, melainkan lingkungannya juga, kebersihannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, para guru menyampaikan agar disediakan truk pengangkut sampah, karena belum terdapatnya fasilitas pengangkutan sampah. Selanjutnya, Edy memerintahkan agar diupayakan truk pengangkut sampah untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. (dedy)

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAKA MELAKUKAN PERATURAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
- RENCANA RPJMD KABUPATEN NIAS DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA MARIANA MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA
- RENCANA RPJMD KABUPATEN NIAS DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN
- RENCANA RPJMD KABUPATEN NIAS DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN
- RENCANA RPJMD KABUPATEN NIAS DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN DAN DAERAH PERKOTAAN PANGLOSSAN



Senin, 16 Juli 2012 Berita & Kegiatan

PPID Merupakan Garis Terdepan Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat



Medan – Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan visitasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas P.K.P. Provinsi Sumut (16/7/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengisian Kuisioner Penerapan Keterbukaan Informasi Publik secara Mandiri (Self Assessment Questioner) dan presentasi Kadis P.K.P. Provinsi terkait Penerapan Keterbukaan Informasi Publik oleh Kepala Dinas P.K.P. Provinsi di Kantor Komisi Informasi, Selasa (16/7) yang lalu. Kegiatan visitasi ini sebagai penilaian terhadap OPD yang

masuk 10 besar grand final Hari Keterbukaan Informasi Nasional.

Dalam visitasi ini komisioner yang dipimpin oleh Eddy Iyashputra didampingi oleh Tim PPID Pembantu Dinas P.K.P. Provinsi yang dipimpin oleh Besliksa Bahinawati. Pada kesempatan tersebut Komisioner mendapat informasi dan melihat langsung Buku Tamu Dinas, Formulir Permohonan Informasi dan Ruang Penerimaan Tamu.

Setelah melakukan peninjauan, beberapa masukan dari Tim Komisioner Informasi Provinsi adalah petugas PPID harus mempunyai kecerdasan dan pengetahuan terkait dengan peraturan yang berlaku, agar paparan informasi dibuat lebih bagus dan lebih informatif, perlu disediakan kursi untuk tamu yang memerlukan informasi, dan yang terakhir KIP bersedia untuk memberikan training kepada petugas PPID untuk tata cara pelayanan terhadap masyarakat. PPID merupakan garis terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, ujar Eddy Iyashputra. Sehingga PPID diharapkan bukan hanya bernyalai namun harus menguasai peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, tambahanya.

Kegiatan visitasi diakhiri dengan sesi foto bersama Tim Komisioner Informasi Provinsi dengan PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi. (jedi)

Tag: Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKOHASI MENYUSUN PERKUTUBAN PERUMAHAN DITINGGAH PROVINSI
- Keperda RPEK Menetapkan Alokasi Dana Program Pemasaran Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN SUMUT IDA WAKILAH MADIL, HARI BAKTI 10 TAHUN
- KOCUS GRO PP DISUSUNKAN (RGS) LAKSUTAN, PERCEPATAN PERUBAHAN DO KURIR KEPD RGS DANAKTI RINTORAS LUNDI PERKURIR KESGI WAKOREI
- SIMERONGTAS BUKERWICUTAWA WIDAWAN SUMUT BERMAKNAWU



Senin, 14, 2016 Berita & Kegiatan

Dinas PKP Provsu Sambut Kedatangan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di ruang rapat Kantor Dinas Jalan AH. Masution selasa (12/7/16). rombongan anggota DPRD KabTapteng dipimpin oleh Awaer Dendi Simanullang A.Md, serta beberapa anggota DPRD yaitu Ir. Saipuddin Simanullang, Ir. Hermunyah Simanullang, Pangihutan Sihotang, Sihotang Marudut, Siregar, Sarbon Tus Limbong, dan Tulus Hutabarat, SE.

Pada kesempatan tersebut Awaer Dendi Simanullang yang juga merupakan wakil ketua DPRD meminta penjelasan terkait penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada perumahan – perumahan yang berkembang di

Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu juga meminta informasi kegiatan – kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan sebagai bentuk dukungan, DPRD akan mendorong Pemkab untuk mempersiapkan usulan dan penyediaan lahannya, ujarnya.

Urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan secara konkuren antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam PP 2/2015, Permendagri 100/2015 serta PermenPUPR 23/2015, ujar Saiful Zuhri selaku penasehat dari Dinas PKP Sumut.

Sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh berwenangnya pemerintah provinsi adalah LOA/d LSH, agar Pemkab Tapteng memperhatikan kawasan kumuh, sehingga dapat dikurangi sesuai berwenangnya dan kebutuhan daerah, tambahnya. Kepada DPRD Kab. Tapteng juga diminta untuk melakukan pengawasan penyusunan dokumen perencanaan perumahan jangka panjang pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pembastan Perdes RP&KP, ujarnya menutup diskusi.

Acara diakhiri dengan melukiskan sesi foto bersama antara pihak Dinas PKP Provsu dengan anggota DPRD Kabupaten Tapteng. (Jed)

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAKA MENYUSUN PERKUTUPAN PERUMAHAN DITINGKAT PROVINSI
- RENCANA RP&KP Kabupaten Pasa dan Kota Pasa: Program Pemasaran dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA HARDAHA HARIRI, HARI BAKTI PUKEKON
- POCUS GEDUP DISUSUNAKAN 1000 LAKSUTAN, PERSEPTAHAN PERUMAHAN DOKUMEN KPRU KUDUMAWA TERINTRODUSI BAKTI PERUSAHAAN KESUKUMAWA
- SINI BAKTI BAKTI KUDUMAWA KUDUMAWA KUDUMAWA KUDUMAWA



1-4

Search

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKAWA MELAKUKAN PERATURAN PERUNDANGAN OTWISAT PROVINSI
- Respond RPSPK Menanggapi Aspirasi Dan Daur Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HARJO, HARI BAKTI PS 5074
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LAKSITAN, PERCEPATAN PERUMAHAN DOKUMEN KPR DI SUMATERA TERINTENSIFASI BAKI PEKERJA KES. SEI MANGKEI
- BIKER BIAS BAKI KURCI SUMUT MELAKUKAN SUMUT BERMAKABAT

September 27, 2019 Berita & Kegiatan

Sumut Menjadi Salah Satu Tuan Rumah Gelaran Indonesia International Property Expo 2019 (IIPEX)

1-4

Medan - Gubay yang diwakili oleh Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu membuka secara resmi gelaran Indonesia International Property Expo 2019 (IIPEX) di Atrium Plaza Medan Fair, Rabu (25/09). Gelaran ini merupakan pameran properti terbesar di Indonesia yang digelar serentak di 4 kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan yang menampilkan produk-produk perumahan terbaik dari developer-developer berkualitas.

Sumatera Utara mengambil peran dalam acara Indonesia International Property Expo 2019 yang artinya bagaimana masyarakat Sumatera Utara bisa bermartabat, bermartabat dalam

artian memiliki rumah yang layak huni. Oleh sebab itu Pemerintah perlu bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) agar kebutuhan rumah untuk masyarakat bisa terpenuhi, ujar Ida Mariana. Jadikanlah semua pembangunan rumah, baik rumah untuk masyarakat yang kurang mampu maupun rumah komersil agar dipermudah proses perijinan dan kepemilikannya. Saya berharap kepada para investor dan pengembang baik yang sudah menanamkan modalnya maupun yang belum, melalui kegiatan ini untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara, karena saat ini Sumatera Utara masih butuh banyak rumah, tambahnya mengakhiri sambutan.

Acara dilanjutkan dengan pengumuman pita dan pemukulan elat musik tradisional tagading sebagai tanda dibukanya acara Indonesia International Property Expo 2019. Acara ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 25 s/d 29 September 2019. Acara ini juga dihadiri oleh, Rej, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BJB, Perumnas dan kurang lebih 200 pengembang dibidang property. (dedi)



04 Oktober 2018 Berita & Kegiatan

Dinas PKP Provsu Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila



Medan – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bertepatan di halaman Kantor Dinas, kelas 14/L0. Bertindak sebagai inspektur upacara Herislananda Pulungan selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan sebagai Komandan Upacara Wainul Ahnand Rangkuti selaku Kepala Balai Pendataan Dan Perencanaan.

Upacara diikuti oleh anggota pejabat eselon III dan IV, serta ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dan pimpinan Staf SWT Penyedisan Perumahan Provsu. (Jed)

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAKA MENYUSUN PERUNTUKAN PERUMAHAN DITINGKAT PROVINSI
- Kepada KPSP Menpa ke Rona Dan Dasa Pagarin Pénah Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN SUMUT IDA WARDANA HADIRI HARTISARTI PD KE-14
- KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2019
- KEBERKATAN BAKU KONGRATAN WEMBAHUSUSUT DEKASTATAT



04 Oktober 2018 Berita & Kegiatan

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019



MEDAN – Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, di Hotel Grand Mercury Medan, Kamis (4/10/2018).

Rapat dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan rumah di Provinsi Sumatera Utara dan strategi untuk mengatasi backlog. Pemerintah bergencar dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman dengan melibatkan peran semua aktor pembangunan serta membuat kesepakatan berbagai instrumen yang dibutuhkan yang meliputi peraturan pelaksanaan, dokumen perencanaan, basis data, pendanaan dan sistem pembiayaan, ujar Herislananda Pulungan selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerangkan bahwa Provsu saat membuka Acara.

Berbagai melalui rapat koordinasi ini, pemerintah baik pusat maupun daerah, serta semua stakeholder seperti perbankan dan asuransi pembiayaan, sosialisasi dan pengembang perumahan subsidi dari sisi supply dan demand sebagai tujuan akhir, dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pembiayaan perumahan, pemaksimalan hunian dan kualitas rumah bersubsidi yang layak huni, tambah lagi.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Bank BRI, BRI, dan beberapa developer lainnya yang ada di Sumatera Utara.

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAKA MENYUSUN PERUNTUKAN PERUMAHAN DITINGKAT PROVINSI
- Kepada KPSP Menpa ke Rona Dan Dasa Pagarin Pénah Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN SUMUT IDA WARDANA HADIRI HARTISARTI PD KE-14
- KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2019
- KEBERKATAN BAKU KONGRATAN WEMBAHUSUSUT DEKASTATAT

Novenber 4, 2018 Berita & Kegiatan

Kadis PKP Sumut Meninjau Korban Kebakaran di Sentosa Lama



Medan – Pasca terbakarnya puluhan rumah di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Benin (11/10) yang lalu, Menyisakan Puing-puing bangunan yang hangus tak bersisa. Sebagian warga sudah ada yang mengungsi ke rumah saudaranya. Sementara sebagian besar korban kebakaran terpaksa masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh relawan. Berbagai bantuan dari elemen masyarakat dan pemerintah telah disampaikan kepada para korban.

Sebagai wujud kepedulian dan rasa empati Kepala Dinas PKP Provinsi Ida Mariana Harahap mendampingi para pengungsi di tenda-tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan para

pengungsi. Warga menyampaikan kondisi mereka saat ini kepada Ibu Kadis.

"Saya tidak ada apa lagi untuk membangun rumah saya kembali, saat ini dan seterusnya saya akan tetap tinggal di tenda-tenda pengungsian ini", disampaikan salah seorang korban kebakaran saat berdialog dengan Ida Mariana.

Melihat kondisi pengungsi yang termasuk masyarakat kurang mampu tersebut, Ida Mariana menyampaikan bahwa masyarakat korban kebakaran tersebut akan difasilitasi mendapatkan kembali hunian baru.

Dalam kesempatan tersebut, kepala dinas juga menyerahkan bantuan sembako melalui posko kebakaran yang nantinya akan dibagikan secara merata kepada para korban.

Medan – Pasca terbakarnya puluhan rumah di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Benin (11/10) yang lalu, Menyisakan Puing-puing bangunan yang hangus tak bersisa. Sebagian warga sudah ada yang mengungsi ke rumah saudaranya. Sementara sebagian besar korban kebakaran terpaksa masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh relawan. Berbagai bantuan dari elemen masyarakat dan pemerintah telah disampaikan kepada para korban.

Sebagai wujud kepedulian dan rasa empati Kepala Dinas PKP Provinsi Ida Mariana Harahap mendampingi para pengungsi di tenda-tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan para pengungsi. Warga menyampaikan kondisi mereka saat ini kepada Ibu Kadis.

"Saya tidak ada apa lagi untuk membangun rumah saya kembali, saat ini dan seterusnya saya akan tetap tinggal di tenda-tenda pengungsian ini", disampaikan salah seorang korban kebakaran saat berdialog dengan Ida Mariana.

Melihat kondisi pengungsi yang termasuk masyarakat kurang mampu tersebut, Ida Mariana menyampaikan bahwa masyarakat korban kebakaran tersebut akan difasilitasi mendapatkan kembali hunian baru.

Dalam kesempatan tersebut, kepala dinas juga menyerahkan bantuan sembako melalui posko kebakaran yang nantinya akan dibagikan secara merata kepada para korban.



Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAKA MENYUSUN PERATURAN PERUMAHAN DITINGKAT PROVINSI
- RENCANA RPJMD KABUPATEN KANAN DAU: Fokus Program Penguatan Pembangunan Di Bidang Pemerintahan Dan Kawasan Perumahan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HARAHAP, HARISANETI PUTRI-ANJUTAN, PERCEPATAN PENYALAPAN DOKUMEN KEPERUMAHAN TERINTIGRASI BAGI PEREKARAWAN BAWOREI
- DINAS REGISTARSI DAN REGISTRASI UTAMA MENBAHUKAN SUMUT BERWAKHABU



Konsep Berita, 2018 Berita & Kegiatan

Hanya Bangsa Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa Yang Besar



Komandan Upacara Peringatan Hari Pahlawan LO November 2019

Medan – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Dinas PKP Provsu melaksanakan upacara bendera yang diadakan di halaman Kantor Dinas Minggu (LO/LL). Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Herisul Ananda Pulungan selaku Pelaksana Sekretaris Dinas dan Komandan Upacara oleh Darisito Bangun.

Setiap hari Pahlawan, kita diingatkan kembali kepada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran tersebut, rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah, melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia, ujar Herisul membeberakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia.

Dengan

peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Father kita Bung Karno yang menyatakan bahwa "Hanya Bangsa Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa Yang Besar". Adapun tema peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 adalah "Aku Pahlawan Masa Kini", yang mempunyai makna menjadi Pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapa pun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terbenas musibah, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan asusila atau merugikan orang lain dan sebagainya, tambahnya.

Upacara Hari Pahlawan dihadiri oleh para pejabat eselon III, eselon IV, dan staf dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta pimpinan dan staf BMT Penyediaan Perumahan Provsu. (dod)



Peserta Upacara Peringatan Hari Pahlawan LO November 2019

Search...

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERKUPRA MEMYUSUN PERKUTUBAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- RENCANA RPORP WILAYAH SUMATERA UTARA DAN RENCANA PERKUTUBAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- KEBALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA WAKILAN RABUL, KANTOR KETUA KEBALA
- RENCANA RENCANA PERKUTUBAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- RENCANA RENCANA PERKUTUBAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- RENCANA RENCANA PERKUTUBAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Keywords: L2, L2B, teacher, L2 acquisition

PENGEMBANG SUMATERA UTARA BERHENTI BANGUN RUMAH SUBSIDI

[illegible][illegible][illegible]

Sebelumnya yang juga sudah melakukan wawancara dengan para ahli di BPS Cirebon bahwa masyarakat di Cirebon sudah lebih banyak melakukan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran elektronik yang lebih memudahkan mereka dalam melakukan transaksi. Selain itu di Cirebon sendiri ada aplikasi yang bernama "Simpatik" yang sudah banyak digunakan masyarakat di Cirebon. Selain itu Cirebon sendiri juga ada aplikasi yang bernama "KIPATV" yang sudah banyak digunakan masyarakat di Cirebon.

[illegible]

Penelitian oleh Tolosa dan rekan-rekannya pada tahun 1992 menemukan bahwa para mahasiswa di kelas matematika dan bahasa Inggris lebih berprestasi di tahun kedua dan ketiga dibandingkan dengan mahasiswa di kelas matematika dan bahasa Inggris di kelas pertama. Penelitian oleh Ruff dan rekan-rekannya pada tahun 1993 menemukan bahwa para mahasiswa di kelas matematika dan bahasa Inggris di kelas pertama lebih berprestasi di kelas kedua dan ketiga dibandingkan dengan mahasiswa di kelas matematika dan bahasa Inggris di kelas pertama.

[illegible]

1. **PERFECT** merupakan kata yang menunjukkan bahwa **PERFECT** sudah selesai atau telah selesai.

Zehn bis fünfzig Prozent der Bevölkerung
 engagieren sich in den verschiedenen
 Mäxchen der Jugendorganisationen.
 Die Mäxchen der Jugendorganisationen
 sind in der Regel aus der Jugendorganisation
 heraus entstanden und haben sich
 in der Regel als eigenständige
 Organisation entwickelt.



Peraturan di bawah ini menguraikan secara lebih detail mengenai pengalihan hak kepemilikan USR dan PPH yang berlaku bagi Kabupaten dan Kota yang memiliki kawasan perikanan. Peraturan ini akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Over the centuries,

- [illegible]



Search

Berita Terbaru

- PEREKSTAS PROVINSI-GG KUTEN
STAN B-DEE PAKY HERYGGS
PENTONAS PEREER SAGGAS
STTIS-BUT PROVINGI
- Beranda EPTET Kewajiban Kanan Kari
Kasur Program Pribasi Pembangunan
Kilikung Bermanah Kari Kanan
Kerubutan
- SEDAK SINGA PEREER HANAS KAS
KEMANG PEREER SINGA KAS HET IBA
KULONAS BARTIL KASIRASUTI PE-SS-TH
- KOCER-G BOP P KACER-GHOS (PO-E)
KARI S-TH, PERCEKING PERVALPE
KOR-HER S-TH K-DECE KANEN
TETIETIS KARI KAS I PEREER KAS-GEI
KAS-GEI
- KIS-PRO KASING KASIR-GS K-DECE
KEMANG KASIR-GS K-DECE KEMANG

19 November 2019 1 artikel & 1 gambar

SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT



Medan – "Pembangunan kawasan terintegrasi Habitat Sungsang ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi, "Sustainable untuk Presiden, prioritas pembangunan CEMH yang dalam pembangunan, perlu sudah insentif untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, SPS B harus tepat saat ini, hingga pembangunan infrastruktur J&J, Habitat Sungsang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan

perubahan pembangunan EES Gilmanghi, di Jalan Syekh Fala, Jalan Syekh Fala dan Jalan Syekh Fala.

Salah satu arahan Gubernur juga menjadi saat ini, pembangunan kawasan terintegrasi Habitat Sungsang ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi, "Sustainable untuk Presiden, prioritas pembangunan CEMH yang dalam pembangunan, perlu sudah insentif untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, SPS B harus tepat saat ini, hingga pembangunan infrastruktur J&J, Habitat Sungsang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden

Ry Bakry, Gubernur, di Jalan Syekh Fala, Jalan Syekh Fala dan Jalan Syekh Fala. Pembangunan kawasan terintegrasi Habitat Sungsang ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi, "Sustainable untuk Presiden, prioritas pembangunan CEMH yang dalam pembangunan, perlu sudah insentif untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, SPS B harus tepat saat ini, hingga pembangunan infrastruktur J&J, Habitat Sungsang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan

Salah satu arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubernur) Ry Bakry adalah saat ini membuka kawasan Forum Group Discussion (FGD) Semangat Program Pengembangan Jaringan Jalan Habitat Sungsang dan



Siswa telah dapat memahami dan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari berbagai jenis sel hewan dan tumbuhan. Siswa dapat memahami dan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari berbagai jenis sel hewan dan tumbuhan. Siswa dapat memahami dan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari berbagai jenis sel hewan dan tumbuhan.

[illegible]

[illegible]

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI
BAKTI PU KE-74

* Perkembangan infrastruktur harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur.

Kategori terdapat di dalam 10 subkategori berikut:
 1. **Manajemen**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Keuangan**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Keuangan Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Keuangan Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Keuangan Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Investasi**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Investasi Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Investasi Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Investasi Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Risiko**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Risiko Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Risiko Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 - **Manajemen Risiko Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 2. **Manajemen Pemasaran**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Pemasaran Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Pemasaran Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Pemasaran Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 3. **Manajemen Operasi**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Operasi Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Operasi Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Operasi Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 4. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Sumber Daya Manusia Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Sumber Daya Manusia Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Sumber Daya Manusia Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 5. **Manajemen Teknologi**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Teknologi Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Teknologi Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Teknologi Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 6. **Manajemen Hukum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Hukum Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Hukum Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Hukum Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 7. **Manajemen Lingkungan**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Lingkungan Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Lingkungan Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Lingkungan Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 8. **Manajemen Sosial**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Sosial Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Sosial Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Sosial Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 9. **Manajemen Budaya**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Budaya Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Budaya Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Budaya Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 10. **Manajemen Lainnya**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 a. **Manajemen Lainnya Umum**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 b. **Manajemen Lainnya Perantara**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:
 c. **Manajemen Lainnya Khusus**, yang terdapat di dalam 3 subkategori, yaitu:

[illegible]



December 20, 2014 1:01pm EST

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA
MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT
PROVINSI



Menurut Galbraith, salah satu keterbatasan dari teori program adalah bahwa perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, tidak dapat melakukan perencanaan jangka panjang yang akurat. Menurut Galbraith, perusahaan-perusahaan yang besar tidak dapat melakukan perencanaan jangka panjang yang akurat karena mereka menghadapi ketidakpastian yang sangat besar mengenai permintaan pasar untuk produk mereka.

Salah satu dampak dari Gerakan Literasi Bangsa Provinsi Sumatera Utara yang diawali oleh Asisten Pendidikan, Pembangunan dan Sosial Njefman Sembagang, Ekaul Halhyar saat memberikan sambutan dan pembahasan antara lain: Penguatan Penguatan Gerakan Literasi Bangsa di lingkungan dan OCE Bidang Penguatan dan Sarana Pembelajaran di Sdit Grandhita, 24-26 Desember 2016.

* Perhitungan perbandingan juga melibatkan variabel waktu, karena dengan menggunakan waktu sebagai variabel waktu perbandingan dapat digunakan dalam model analisis perbandingan. Dan hasil dari perbandingan ini dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami perbandingan yang ada.

* Kami telah melakukan uji coba program pembelajaran di kelas, dan telah mendapatkan umpan balik yang menarik dari siswa, sehingga kami dapat melakukan peningkatan.

[illegible]

Balai Khatibul Ummah, Fomulasi Fraksi Gorontalo, Karesidenan mempunyai Peranan Perancangan (Rancangan Fraksi), dimana pada hal kegiatan ini dilakukan oleh pada pemerintahan provinsi Gorontalo Terkenal Fraksi Kewenangan dan OOT Bidang Perumahan dan Sarana Perumahan.

Itu's ambungan dari Gajahwari daerah provinsi Sumatera Utara
 awas berwujud di ambungan, Pengaruh yang di ambungan di
 kapal kemas. Pengaruh dan kemas di ambungan di Marjuna.

⁴Contoh salah ini Gumarwa. Beliau masih banyak rumah yang tidak layak huni, tetapi lagi yang akan diperbaiki dan hal itu akan jadi hal yang indah jika di luar sana. Beliau dalam pengaplikasiannya.

* Untuk bagian dari pengembangan yang di luar dari pemerintah, pemerintah/lembaga lain yang bertanggung jawab membantu pemerintah dalam hal ini.



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

10

Barbara T. Yarbrough

- [illegible]